

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian Ekonomi Syariah semakin meluas pada masa ini. Sejalan dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat dengan kajian ekonomi Islam, dan pertumbuhan studi ekonomi Islam tentunya akan mempengaruhi studi ekonomi mikro seperti akuntansi. Ada rasa kehausan untuk mempelajari ekonomi atau akuntansi Islam baik dikalangan masyarakat, ilmuwan, maupun mahasiswa. Hal berikut dapat dilihat dari berbagai kajian, seminar, pusat studi, bahkan jenjang pendidikan yang khusus membahas tentang ekonomi atau akuntansi Islam. Seiring dengan dorongan dan perkembangan zaman, peluang belajar studi Islam bisa melalui segalanya. Islam memberikan keluasaan seluas-luasnya pada manusia untuk mempelajarinya dengan akal pikiran manusia sebanyak-banyaknya dengan maksimal, namun tidak boleh sampai penggunaannya melewati batas dan merambak dari rambu-rambu ajaran Allah SWT (Batubara et al., 2018).

Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, maka akuntansi syariah berdampak cukup besar bagi kelangsungan hidup akuntansi dalam jangka panjang. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim memerlukan perluasan akuntansi islam. Akuntansi syariah merupakan sebuah metode akuntansi yang digunakan dalam masyarakat dengan aturan hukum Islam. Akuntansi syariah mencakup segala sesuatu mulai dari pencatatan transaksi, tindakan, dan penilaian hingga melacak jumlah total pilihan.

Akuntansi syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, baik dalam teorinya maupun prakteknya. Akuntansi syariah banyak digunakan karena prinsip-prinsipnya yang bukan hanya mementingkan hubungan keadaan antara manusia dengan manusia, namun juga memerhatikan ikatan diantara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Pada agama Islam, ada nilai-nilai yang mendasari setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim, baik secara pribadi ataupun komunal. Saat ini banyak industri keuangan yang berbasis syariah, yang mencakup bank syariah, asuransi syariah, bahkan saham syariah. Namun, pada sektor non-keuangan akuntansi syariah belum banyak digunakan. Terciptanya kultur transaksi dengan wawasan emansipatoris, humanis, teologis,

dan transcendent adalah tujuan dari akuntansi syariah. Dengan adanya akuntansi syariah, kenyataan sosial didirikan dengan menganut nilai ketundukan dan kepatuhan kepada ketentuan Allah SWT (Pratama et al., 2017).

Aceh merupakan salah satu daerah yang menganut kuat syariat Islam. Masyarakat Aceh menjunjung tinggi nilai-nilai Islami dalam kehidupan mereka, sehingga membuat Aceh menjadi salah satu daerah yang diistimewakan, dimana Aceh dapat membuat peraturan daerah berdasarkan syariat Islam yang disebut dengan qanun Aceh. Pada dasarnya Aceh telah banyak menerapkan prinsip dan sistem akuntansi syariah pada peraturan daerahnya, sehingga saat ini seluruh lembaga keuangan di Aceh telah berbasis syariah.

Aceh memiliki keistimewaan yang dapat membuat peraturan daerah sesuai dengan syariat Islam, seharusnya dapat menerapkan konsep pemerintahan yang Islami, dimana kegiatan pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan konsep syariat Islam tetapi tidak bertolak belakang dengan peraturan undang-undang sistem pemerintahan Indonesia, begitu juga tata pemerintahan syariah menunjukkan bahwa, tidak menentang hak asasi manusia dan hukum internasional.

Sejalan dengan perkembangan Akuntansi sektor publik di Negara ini, bentuk pertanggungjawaban pada publik terhadap kapabilitas pemerintah menjadi sebuah desakan yang umum. Kuatnya desakan itu menjadikan otoritas publik untuk harus memberikan informasi tentang kegiatan mereka dan hasil kegiatan mereka kepada publik (Soimah, 2015). Organisasi sektor publik yang berhubungan dengan pemerintahan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan masyarakat guna menjamin kesejahteraan di macam-macam bidang kehidupan. Pemerintah adalah badan publik yang wajib bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya dalam wujud laporan keuangan. Pemerintah berkeharusan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib, cocok dengan peraturan undang-undang, secara efektif, efisien, ekonomis, dan transparan. Pemerintah juga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi besar diberbagai macam bidang, sebagai bentuk upaya dalam memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya tuntutan tersebut lembaga-lembaga pemerintah diharuskan untuk menggunakan biaya anggaran dengan efektif, efisien, dan transparan.

Sebuah lembaga pemerintah yang berskala besar memiliki transaksi dan data yang banyak sehingga tanggung jawabnya juga besar dalam mengidentifikasi, mengelola data dan transaksi menjadi sebuah laporan keuangan (T. Fahma Riansyah & Kamilah, 2022). Keadaan pertanggungjawaban pada Kabupaten Gayo Lues lumayan kompleks. Kerap terjadi penyimpangan diantara anggaran dan realisasinya. Pemicunya lantaran belum diurutkan jenjang pertanggungjawaban dari jenjang terendah ke jenjang paling tinggi dalam setiap peranannya. Belum adanya pemisahan biaya tidak terkendali dengan biaya terkendali. Dampaknya penetapan anggaran kas serta bagian kas yang semestinya bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi mengalami kesulitan. Maka dari itu butuh diterapkannya nilai-nilai akuntansi syariah.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah elemen pemerintah wilayah, dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan wilayah serta layanan umum, baik dengan cara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya), SKPD dialokasikan dana anggaran dan aset atau barang yang diperlukan. Maka dari itu, kepala SKPD diutarakan selaku Pengguna Barang (PB) serta Pengguna Anggaran (PA). Sebagai entitas akuntansi, SKPD sejatinya menampilkan kalau SKPD melakukan proses akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk diinformasikan kepada kepala daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengurusan keuangan wilayah yang merangkap barang dan anggaran, diikuti dengan dana yang dikelola bendahara sebagai pejabat fungsional (Amisepti, n.d.).

Konteks peraturan pemerintahan daerah yang mengatur mengenai kepengurusan keuangan wilayah, mensyaratkan supaya pengurusan keuangan wilayah dilakukan dengan cara yang tertib, selaras dengan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan menanamkan dasar-dasar keadilan, kepatuhan, dan manfaatnya bagi publik. Mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK), laporan keuangan pemerintah daerah dirancang berlandaskan laporan keuangan SKPD serta disampaikan kepada Kepala Daerah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan APBK.

Penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten) didasarkan oleh peraturan wilayah. Seiring dengan target bernegara serta pula tidak berubah-ubah dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). APBK berperan penting dalam menentukan strategi tercapainya tujuan otonomi daerah sebagai pendengar dan pelayan bagi aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, APBD juga bisa dikaitkan sebagai arah untuk sampai pada tujuannya sebagai media penyambung suara masyarakat antar lembaga legislatif serta eksekutif (Shalsabila & Kamilah, 2022). Dikutip dari web formal Departemen Keuangan, APBK wajib disesuaikan dengan masyarakat. Artinya, masyarakat harus merasakan manfaat pengelolaan keuangan daerah sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. APBK adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah wilayah, desepakati dan dibahas pemerintah wilayah dan DPRD, serta diformalkan melalui peraturan wilayah. APBK ialah instrumen kebijakan terpenting pemerintahan untuk pemerintah wilayah. Anggaran wilayah juga dipakai sebagai instrumen untuk memutuskan tingkat penerimaan dan pengeluaran. Tidak hanya itu, APBK juga berguna untuk mendukung pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan, dan untuk menyetujui pengeluaran di masa mendatang.

Nilai-nilai Akuntansi Syariah akan mempermudah organisasi sektor publik dalam menyediakan informasi akuntansi yang relevan serta dapat diandalkan untuk menyelenggarakan tugas-tugas perencanaan serta pengendalian organisasi. Untuk menyelenggarakan program di dalam suatu organisasi pemerintah penting adanya perencanaan berapa besar anggaran atau jumlah yang akan dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Pengendalian biasanya ditujukan guna memeriksa efektivitas pelaksanaan rencana di kantor, serta mengoreksi kekeliruan yang ada. Oleh karena itu, jika ada kekurangan dan kelemahan pada rencana kebijakan, bisa ditangani dengan tegas dan cepat. Salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan menerapkan nilai dan prinsip akuntansi syariah yaitu keadilan, dimana mendelegasikan wewenang kepada suatu departemen secara tegas. Kinerja departemen akan dievaluasi berdasarkan pada pembagian wewenang serta tugas untuk departemen ataupun divisi, tiap-tiap departemen mempunyai suatu andal terkait wewenang itu.

Salah satu tantangan yang dialami pimpinan adalah mengawasi dan mengendalikan anggaran atau pengeluaran. Sementara pengendalian dan pengawasan anggaran sulit dilakukan sebab pimpinan tidak bisa mengikuti secara langsung keseluruhan operasional, namun transaksinya semakin banyak dan bervariasi. Akibatnya, kerap terjadi penyelewengan anggaran pada di Kabupaten Gayo Lues. Sebagai akibat dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gayo lues maka perlu dilakukan pembenahan manajemen organisasi yaitu memperbaiki struktur organisasi yang diwujudkan dengan menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah, yang berupa penerapan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran, ketakwaan, dan kejujuran yang dapat digunakan untuk meningkatkan tujuan kantor pemerintahan daerah Gayo Lues. Dari pemaparan di atas dan menyadari perlunya nilai-nilai akuntansi syariah serta pengendalian anggaran ataupun pengeluaran pada entitas pemerintahan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Nilai-Nilai Akuntansi Syariah Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Pada Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues”.

B. Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka didapati identifikasi masalah berikut ini, yaitu:

1. Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap kajian ekonomi Islam, tetapi kurang maksimal dalam penerapannya.
2. Aceh harusnya dapat menerapkan konsep pemerintahan yang Islami, dimana kegiatan pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan konsep syariat Islam tetapi tidak bertolak belakang dengan peraturan undang-undang sistem pemerintahan Indonesia, begitu juga susunan pemerintahan syariah menunjukkan bahwa, tidak menentang hak asasi manusia dan hukum internasional.
3. Keadaan pertanggungjawaban pada Kabupaten Gayo Lues lumayan kompleks. Kerap terjadi penyimpangan antara anggaran serta realisasi anggaran.

4. Pengendalian dan pengawasan anggaran sulit dilakukan sebab pimpinan tidak bisa mengikuti secara langsung keseluruhan operasional, namun transaksinya semakin banyak dan bervariasi.

C. Batasan Masalah

Dari penjabaran identifikasi masalah tersebut, dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini pada penerapan nilai-nilai akuntansi syariah pada Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues sebagai alat pengendalian anggaran.

D. Rumusan Masalah

Didasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka yang jadi pokok masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya penerapan nilai-nilai akuntansi syariah sebagai alat pengendalian anggaran pada Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tanggapan para pejabat dan pegawai Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues terhadap penerapan nilai-nilai akuntansi syariah pada perencanaan dan perealisasi anggaran?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan nilai-nilai akuntansi syariah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengenali upaya penerapan nilai-nilai akuntansi syariah sebagai alat pengendalian anggaran pada Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues
- b. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai akuntansi syariah pada perencanaan dan perealisasi anggaran menurut pejabat dan pegawai

Dinas Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gayo Lues

- c. Untuk mengetahui apa saja penghambatan dan pendukung penerapan nilai-nilai akuntansi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan hendaknya memiliki manfaat dan bisa berguna untuk banyak hal, beberapa diantaranya untuk sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa meluaskan pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai akuntansi syariah sebagai alat pengendalian anggaran bagi para pembaca.

- b. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini hendaknya bisa memberikan suatu sumbangsih pemikiran ekonomi, serta dapat menjadi gambaran akademik terkait penerapan nilai-nilai akuntansi syariah.

- c. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini hendaknya bisa memberikan tambahan informasi, masukkan yang berguna, dan menjadi bagian dari pertimbangan khususnya di dalam menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah.

- d. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini hendaknya bisa menambah serta meluaskan pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai akuntansi syariah.